

**KONTRIBUSI PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN BANTUL
(Periode 1996/1997 – 2005)**

Supardi^{)}*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1). kontribusi pendapatan retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Bantul; 2). tingkat dan kecenderungan efektivitas dalam penerimaan retribusi daerah di Kabupaten Bantul; 3). besarnya elastisitas retribusi terhadap perubahan realisasi penerimaan PAD di Kabupaten Bantul; 4. prospek realisasi penerimaan retribusi daerah pada tahun yang akan datang.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu usaha untuk mengatasi pembiayaan urusan penyelenggaraan pemerintah. Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, sektor retribusi merupakan sektor yang sangat besar dan potensial untuk digali dan diperluas pengelolaannya, karena retribusi daerah dipungut atas balas jasa yang disediakan pemerintah daerah.

Kontribusi retribusi daerah Kabupaten Bantul terhadap PAD pada periode tahun anggaran 1996/1997 sampai dengan 2005 mengalami peningkatan dari 57,8% pada tahun 1996/1997 menjadi 62,9% pada tahun 2005.

Efektivitas pengelolaan retribusi Kabupaten Bantul dari tahun anggaran 1996/1997 sampai tahun 2005 dapat dikatakan semakin efektif. Pada tahun 1996/1997 efektivitasnya 101,1% naik menjadi 102,0% pada tahun 2005.

Elastisitas retribusi terhadap PAD Kabupaten Bantul secara keseluruhan dapat dikatakan elastis dengan elastisitas pada tahun 1996/1997 sebesar 1,37% dan pada tahun 2005 sebesar 1,18%.

Prospek realisasi penerimaan retribusi daerah pada tahun yang akan datang diproyeksikan meningkat. Pada tahun 2007 Rp 25.809.843,85 tahun 2008 meningkat menjadi Rp 28.220.598,95 dan pada tahun 2009 diproyeksikan meningkat menjadi Rp 30.361.354,05. Hal ini juga dipengaruhi semakin meningkatnya jumlah PAD yang diproyeksikan pada tahun 2007 Rp 161.434.263,10 tahun 2008 meningkat menjadi Rp 183.642.785,00 dan pada tahun 2009 meningkat menjadi Rp 205.642.785,00.

Kata kunci: kontribusi pendapatan, retribusi, PAD.

Pendahuluan

Peran otonomi daerah yang bertanggung jawab diharapkan mampu untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk lebih aktif dalam mengelola dana penerimaan pemerintah yang meliputi penerimaan pajak, penerimaan yang diperoleh dari penjualan barang dan jasa yang dimiliki pemerintah. Banyak faktor yang mempengaruhi proses pembangunan antara

^{*)} Dosen Tetap STIE Nusa Megarkencana, Yogyakarta

lain, faktor sumber daya terbatas, faktor sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya ekonomi.

Menurut Mariun (1975) Dari ketentuan dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, Pemerintah Daerah dapat disebutkan bahwa:

1. Wilayah Indonesia dibagi dalam daerah-daerah, baik yang bersifat otonom maupun bersifat administratif.
2. Daerah-daerah itu mempunyai pemerintahan.
3. Pembagian wilayah dan bentuk susunan pemerintahan ditetapkan atas kuasa undang-undang.
4. Dalam pembentukan daerah-daerah itu, terutama daerah-daerah otonom, dan dalam menentukan susunan pemerintahannya harus diingat permusyawaratan dan dalam sistem pemerintahan dan hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

Seperti yang diungkapkan pada Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, salah satu bagian dari sumber pendapatan adalah berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari:

1. Hasil pajak daerah
2. Hasil retribusi daerah
3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
4. Lain-lain pendapatan yang sah.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu usaha untuk mengatasi pembiayaan urusan penyelenggaraan pemerintah. Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, sektor retribusi daerah merupakan sektor yang sangat besar untuk digali dan diperluas pengelolaannya, karena retribusi daerah dipungut atas balas jasa yang disediakan pemerintah. Pelaksanaan pemungutan retribusi daerah dilakukan diluar waktu yang telah ditentukan oleh peraturan undang-undang, selama pemerintah daerah dapat menyediakan jasa atas pungutan atas dasar persetujuan pemerintah pusat.

Untuk mengetahui besarnya kontribusi pendapatan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bantul, maka penulis bermaksud untuk

meneliti dengan judul : "Kontribusi Pendapatan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bantul (Periode 1996/1997 – 2005)".

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Seberapa besar kontribusi pendapatan retribusi daerah sebagai sumber APBD terhadap total PAD di Kabupaten Bantul?
2. Seberapa besar tingkat efektivitas penerimaan retribusi daerah di Kabupaten Bantul?
3. Berapakah tingkat elastisitas retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bantul?
4. Seberapa besar prospek penerimaan retribusi daerah pada tahun-tahun akan datang?

Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis

Pemerintah daerah

Berdasarkan pada ketetapan MPR-RI Nomor: XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah yaitu tentang: pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberi kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.

Keuangan daerah

Aspek penting yang terkait dengan pemerintah daerah mengenai masalah pembiayaan. Instrumen penting yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah menduduki posisi sentral dalam pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintahan daerah. Ada beberapa kaidah 10 dasar (paradigma) yang harus diperhatikan dalam pengelolaan keuangan dan anggaran daerah. Paradigma pengelolaan keuangan daerah meliputi:

- 1). Pengelolaan keuangan harus bertumpu pada kepentingan publik (*Public Oriented*).
- 2). Kejelasan tentang misi pengelolaan daerah pada umumnya dan anggaran daerah pada khususnya.
- 3). Desentralisasi pengelolaan keuangan dan kejelasan peran serta para partisipan yang terkait dengan pengelolaan anggaran seperti DPRD, Sekda, dan perangkat daerah lainnya.
- 4). Kerangka hukum dan administrasi bagi pembiayaan investasi pengelolaan keuangan daerah berdasarkan kaidah mekanisme pasar, *value for money*, transparansi, dan akuntabilitas.
- 5). Kejelasan tentang kedudukan DPRD, KDH, dan PDN daerah, baik rasio maupun dasar pertimbangan.
- 6). Ketentuan tentang bentuk dan struktur anggaran, anggaran kinerja, dan anggaran multi tahunan.
- 7). Prinsip pengadaan dan pengelolaan barang daerah yang lebih profesional.
- 8). Prinsip akuntansi pemerintah daerah, laporan keuangan, peran DPRD dan akuntan publik dalam pengawasan, pemberian opini, dan rating kinerja anggaran, serta transparansi informasi anggaran kepada publik.
- 9). Aspek pembinaan dan pengawasan yang meliputi batasan pembinaan profesionalisme aparat pemerintah daerah.
- 10). Pengembangan sistem informasi keuangan daerah untuk menyediakan informasi anggaran dan penyebaran informasi yang akurat.

Sumber-sumber penerimaan daerah

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

- a). Pajak daerah
- b). Retribusi daerah
- c). Perusahaan milik daerah
- d). Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

2. Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonom kepada daerah. Dana perimbangan terdiri dari: dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.

3. Pinjaman Daerah

Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah menetapkan bahwa pinjaman daerah adalah salah satu sumber penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang dicatat dan dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dana pinjaman merupakan pelengkap penerimaan daerah dengan tujuan membiayai pengadaan prasarana daerah.

Lain-lain penerimaan yang sah

Pendapatan lain-lain yang sah merupakan pendapatan yang didapat berdasarkan Undang-undang yang telah ditentukan.

Retribusi daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

1. Subyek retribusi dan wajib retribusi daerah
 - a). Subyek retribusi umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Subyek ini merupakan wajib retribusi jasa umum.
 - b). Subyek retribusi usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa yang bersangkutan. Subyek ini dapat merupakan wajib retribusi usaha.
 - c). Subyek retribusi perijinan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh ijin tertentu dari pemerintah daerah.

2. Obyek retribusi daerah

Obyek retribusi adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah. Jenis jasa yang dijadikan pertimbangan sosial ekonomi sebagai obyek tertentu. Jasa tertentu tersebut dikelompokkan menjadi tiga golongan yaitu:

a). Retribusi jasa umum

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum dan dinikmati oleh pribadi atau badan.

b). Retribusi jasa usaha

Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Pelayanan yang disediakan pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial meliputi:

- Pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.
- Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum memadai disediakan oleh pihak swasta.

c). Retribusi perijinan tertentu

Retribusi perijinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka memberikan ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana guna melindungi kepentingan umum dan melestarikan lingkungan.

3. Tarif retribusi daerah

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperlihatkan penyediaan jasa yang bersangkutan. Tarif retribusi ditinjau paling lama 5 (lima) tahun sekali.

4. Tata cara pemungutan dan sangsi retribusi daerah

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan artinya seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan pada pihak ketiga,

terkecuali pihak yang diajak kerja sama dapat dipercaya untuk melaksanakan tugas pemungutan atau profesional.

5. Ciri-ciri pokok retribusi daerah sebagai berikut:
 - a). Retribusi daerah dipungut oleh daerah.
 - b). Dalam pemungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah langsung yang ditunjuk.
 - c). Retribusi dapat dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan jasa yang diberikan daerah.

Menurut Devas (1989) teori retribusi pemerintah daerah merupakan kebijakan memungut bayaran untuk barang dan layanan yang disediakan pemerintah berpangkal pada pengertian efisiensi ekonomi. Penerimaan dari pemungutan adalah sumber daya untuk menaikkan produksi sesuai dengan keadaan permintaan. Barang “masyarakat” bermanfaat untuk semua orang terlepas dari berapa mereka membayar. Contoh: layanan kesehatan.

Teori ekonomi mengatakan harga barang atau layanan yang disediakan pemerintah hendaknya didasarkan pada biaya tambahan yakni biaya untuk melayani konsumen, karena sebagian besar layanan pemerintah disediakan dari kedudukan monopoli, maka manfaat ekonomi untuk masyarakat akan paling tinggi. Dapat dikatakan asas harga sama dengan biaya tambahan dapat dijadikan pedoman yang berguna dalam menentukan harga.

Penelitian Terdahulu

Bagus Santoso (1995) telah menganalisis Retribusi Pasar Sebagai Pendapatan Asli Daerah, studi kasus pasar Kabupaten Sleman periode tahun anggaran 1988/1989 sampai dengan tahun 1991/1992. Sebagian besar penerimaan retribusi daerah berasal dari rumah sakit dan pasar. Di DIY maupun di Kabupaten Sleman menunjukkan transformasi struktural yang seragam yaitu peran semakin meningkat, penerimaan retribusi daerah sebesar 9,4% pada tahun anggaran 1988/1989 dan turun menjadi 7,4% (1991/1992) dari keseluruhan penerimaan Pemda Kabupaten Sleman.

Persentase pengeluaran penerimaan retribusi rumah sakit menurun dari 28,92% (1988/1989) menjadi 26,21% (1991/1992). Sedang persentase penerimaan retribusi

pasar dari 26,21% (1988/1989) menjadi 36,02% (meningkat). Pemungutan retribusi pasar dilakukan berdasarkan Perda No. 10/1993.

Analisis kontribusi retribusi daerah dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah studi kasus Dipenda Kota Bandar Lampung 1999/2000, 2000/2001 telah diuji oleh Anita (2003). Hasil penelitian bahwa jenis retribusi daerah yang ada di Bandar Lampung setiap tahun mengalami penambahan. Pada tahun 1999/2000 hanya terdapat 13 jenis retribusi dan pada tahun 2001 menjadi 18 retribusi. Tahun 1999/2000 retribusi daerah memberikan kontribusi terhadap PAD sebesar 36,77%. Tahun anggaran 2000 terjadi penurunan, yaitu menjadi 35,75% dikarenakan terjadi perubahan anggaran tahun 2000 terdiri dari bulan Maret sampai Desember.

Kontribusi retribusi pasar terhadap peningkatan PAD dalam melaksanakan otonomi daerah di Kota Bengkulu tahun anggaran 1998/1999 – 2001 telah diuji Haryadi (2003) dan dapat disimpulkan bahwa kontribusi retribusi pasar terhadap peningkatan PAD bersifat fluktuatif.

Pada tahun anggaran 1998 – 1999 persentase retribusi pasar terhadap PAD sebesar 51,90% dan pada tahun anggaran 1999 – 2000 mengalami kenaikan sebesar 28,42%. Kontribusi retribusi pasar terhadap PAD terus mengalami penurunan, pada tahun anggaran 1998/1999 persentasenya sebesar 20,60%, tahun anggaran 2000 sebesar 13,88%, dan tahun anggaran 2001 sebesar 12,23%.

Berdasarkan analisis trend yang digunakan untuk memproyeksikan pendapatan retribusi pasar tahun anggaran 2003 sampai tahun anggaran 2005 menunjukkan trend yang positif, PAD juga menunjukkan trend yang positif.

Hipotesis

Berdasarkan keterangan diatas dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut:

1. Kontribusi pendapatan retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah dari tahun 1996/1997 sampai 2005 mengalami peningkatan.
2. Pemungutan retribusi daerah di Kabupaten Bantul periode 1996/1997 sampai 2005 cenderung semakin efektif.
3. Tingkat elastisitas retribusi daerah terhadap PAD semakin elastis.
4. Prospek penerimaan retribusi daerah pada tahun-tahun yang akan datang akan mengalami peningkatan.

Metode Penelitian

(1) Variabel Penelitian

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Variabel bebas (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Variabel terikat (Retribusi daerah) adalah pungutan sebagai pembayaran jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Retribusi daerah sama halnya dengan pajak daerah dan merupakan salah satu PAD yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah.

(2) Teknik Analisis Data

a. Kontribusi Retribusi terhadap PAD (Abdul Halim, 2001)

Kontribusi retribusi adalah indikator yang digunakan untuk mengetahui sumbangan retribusi terhadap total PAD.

Rumusnya adalah:

$$K = \frac{\sum RPR}{\sum PAD} \times 100\%$$

Keterangan: K = Kontribusi retribusi terhadap PAD

$\sum RPR$ = Jumlah realisasi retribusi

$\sum PAD$ = jumlah PAD

b. Efektivitas

Efektivitas adalah hubungan antara hasil penerimaan retribusi dari retribusi terhadap potensi retribusi.

Rumusnya adalah:

$$Efektivitas = \frac{\text{Realisasi penerimaan retribusi}}{\text{Target penerimaan retribusi}} \times 100\%$$

c. Elastisitas

Elastisitas bertujuan untuk mengetahui kepekaan perubahan retribusi yang menyebabkan perubahan perubahan PAD.

Rumusnya adalah:

$$Elastisitas = \frac{\% \text{ pertumbuhan retribusi}}{\% \text{ pertumbuhan PAD}}$$

Kriteria pengujian:

- 1). $E < 1$ bersifat elastis, berarti menunjukkan bahwa penerimaan dari retribusi mengalami peningkatan sebesar satu persen, PAD mengalami perubahan lebih kecil satu persen.
- 2). $E = 1$ bersifat *unitary* elastis, berarti menunjukkan bahwa retribusi menunjukkan tidak mengalami perubahan, PAD tetap.
- 3). $E > 1$ bersifat elastis, berarti menunjukkan bahwa penerimaan retribusi mengalami perubahan sebesar satu persen, maka PAD juga mengalami perubahan lebih besar satu persen.

d. Analisis Trend (Subagyo, 1995)

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui aspek penerimaan retribusi sebagai salah satu pengeluaran rutin. Retribusi merupakan salah satu sumber penerimaan dalam PAD. Rumus yang digunakan:

$$Y' = a + bx$$

$$Y' = \text{nilai trend PAD}$$

$$a = \text{konstanta}$$

$$b = \text{Slope atau lereng garis trend}$$

$$x = \text{periode waktu}$$

untuk mencari a dan b menggunakan rumus:

$$a = \frac{\sum y}{n}$$

Keterangan: y = nilai trend

a = konstanta

$$b = \frac{\sum xy}{n}$$

Keterangan: b = slope

x = interval waktu

n = jumlah data

Hasil Pengujian Hipotesis dan Pembahasan

1. Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Bantul

Indikator yang digunakan untuk mengetahui besarnya sumbangan (kontribusi) retribusi daerah adalah persentase penerimaan retribusi terhadap PAD.

Adapun rumusnya:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\sum \text{Realisasi Penerimaan Retribusi}}{\sum \text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 1
Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 1996/1997 – 2005 (Rp 000)

Tahun	Realisasi Penerimaan Retribusi	PAD	Kontribusi(%)
1996/1997	2.970.663	5.142.803	57,8
1997/1998	3.567.097	6.014.540	59,3
1998/1999	3.387.967	6.555.905	51,7
1999/2000	4.910.778	8.011.806	61,3
2000	4.456.880	7.074.418	63,0
2001	8.467.347	14.073.123	60,3
2002	12.162.663	22.425.146	54,2
2003	18.489.366	32.882.358	56,2
2004	19.186.122	30.777.820	62,3
2005	23.800.474	37.830.788	62,9

Sumber: APBD Pemda Kabupaten Bantul (data diolah)

Dari Tabel 1 dapat diketahui kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun anggaran 1996/1997 sampai dengan tahun 2005 mengalami peningkatan dari 57,8% pada tahun 1996/1997 menjadi 62,9% pada tahun 2005, meskipun terdapat fluktuasi. Untuk periode tahun anggaran 1996/1997 sampai dengan 1997/1998, kontribusi retribusi mengalami peningkatan sebesar 1,5%, selanjutnya untuk tahun anggaran 1997/1998 mengalami peningkatan sebesar 1,5%, itupun tidak jauh berbeda dikarenakan meningkatnya pos-pos retribusi terutama pada pendapatan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) serta pendapatan rumah sakit dan balai pengobatan (Pemda, 1998).

Tahun 1998/1999 kontribusinya mengalami penurunan sebesar 7,6% dari tahun anggaran 1998/1999 seperti pendapatan retribusi parkir, tempat rekreasi, pariwisata, dan IMB dikarenakan kevakuman pejabat bupati selama 6 bulan. Untuk periode 1999/2000 kontribusi mulai meningkat dari periode tahun 1998/1999 yaitu 9,6%, disebabkan pendapatan retribusi tertentu semakin meningkat seperti pelayanan kesehatan, retribusi terminal, penjualan produk usaha daerah, IMB, dan pemakaian kekayaan daerah yaitu adanya proyek *stoom walls*, MCK pasar maupun sewa gedung GOR Dwi Windu, Gedung Gabusan, dan Gedung Pemda (Pemda, 1999).

Pada tahun anggaran 2000 kontribusi retribusi mengalami peningkatan sebesar 1,7% dari tahun anggaran sebelumnya 1999/2000, hal ini disebabkan adanya peningkatan retribusi parkir, pasar, penggantian biaya cetak KTP dan akte catatan sipil, dan ijin trayek. Kemudian pada tahun 2001 menurun sebesar 2,8% dari anggaran tahun 2000 dan anggaran 2002 menurun sebesar 6% dari tahun anggaran 2001. Keseluruhan disebabkan oleh pendapatan retribusi penggantian cetak KTP dan akte catatan sipil, rumah pemotongan hewan, retribusi parkir di pinggir jalan umum, retribusi terminal, dan ijin trayek. Pada periode tahun anggaran 2003 kontribusinya mengalami peningkatan kembali sebesar 2% dari tahun anggaran 2002, karena adanya peningkatan pada beberapa pendapatan retribusi seperti retribusi kebersihan, penggantian cetak KTP dan akte catatan sipil, retribusi pasar, pemakaian kekayaan daerah, dan retribusi ijin trayek. Selain itu disebabkan pula oleh penambahan retribusi tempat olah raga dan penjualan produk usaha daerah. Tahun anggaran 2004 kontribusi mengalami peningkatan kembali 6,1% dari tahun

anggaran 2003. Pada tahun anggaran 2005 kontribusi mengalami peningkatan yang tidak cukup besar disebabkan oleh peningkatan beberapa pos-pos retribusinya hanya sedikit yang bisa melampaui target seperti retribusi pelayanan kesehatan, kebersihan, IMB, dan pengujian kendaraan bermotor.

2. Efektivitas Retribusi

Perhitungan efektivitas bertujuan untuk mengetahui apakah target retribusi yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran dapat dicapai pada akhir periode.

Adapun rumusnya:

$$Efektivitas = \frac{\text{Realisasi penerimaan retribusi}}{\text{Target penerimaan retribusi}} \times 100\%$$

Tabel 2
Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Bantul
Tahun Anggaran 1996/1997-2005 (Rp 000)

Tahun	Realisasi Penerimaan Retribusi	Target Penerimaan Retribusi	Efektivitas(%)
1996/1997	2.970.663	2.935.935	100,7
1997/1998	3.567.097	3.717.180	95,9
1998/1999	3.387.967	3.490.690	97,0
1999/2000	4.910.778	4.096.870	119,8
2000	4.456.880	4.284.170	104,0
2001	8.467.347	8.244.424	102,7
2002	12.162.663	12.538.449	97,0
2003	18.489.366	17.937.662	103,0
2004	19.186.122	19.620.692	97,0
2005	23.800.474	23.343.946	102,0

Sumber: APBD Pemda Kabupaten Bantul (data diolah)

Dari Tabel 2 dapat diketahui bahwa efektivitas retribusi daerah Kabupaten Bantul selama 10 tahun dari tahun anggaran 1996/1997 sampai dengan tahun anggaran 2005 bisa dikatakan cenderung efektif. Pada tahun anggaran 1996/1997 dari 101,1% naik menjadi 102,0% pada tahun anggaran 2005. Efektivitas tertinggi terdapat pada tahun anggaran 1997/1998, yaitu sebesar 95,9%.

Tahun anggaran 1996/1997 efektivitas sebesar 101,1%, tahun anggaran 1997/1998 efektivitasnya sebesar 95,9%, tahun anggaran 1998/1999 efektivitasnya sebesar 97,0%, tahun anggaran 1999/2000 efektivitasnya sebesar 119,8%, tahun anggaran 2000 efektivitasnya sebesar 104,0%, tahun anggaran 2001 efektivitasnya sebesar 102,7%, tahun anggaran 2002 efektivitasnya sebesar 103,0%, tahun anggaran 2004 efektivitasnya sebesar 97,8%, tahun anggaran 2005 efektivitasnya sebesar 102,0%. Meskipun nilai tingkat efektivitasnya ada yang kurang dari 100%, akan tetapi menunjukkan bahwa, penerimaan daerah Kabupaten Bantul cukup bagus dalam pengembangan pendapatan retribusinya.

3. Elastisitas

Perhitungan ini bertujuan untuk mengetahui kepekaan perubahan retribusi yang menyebabkan perubahan penerimaan PAD.

Adapun rumusnya:

$$Elastisitas = \frac{\% \text{ pertumbuhan retribusi}}{\% \text{ pertumbuhan PAD}}$$

Tabel 3
Elastisitas Retribusi Daerah Terhadap PAD

Tahun	Realisasi penerimaan retribusi	Pertumbuhan retribusi (%)	PAD	Pertumbuhan PAD (%)	Elastisitas (%)
1996/1997	3.970.663	28,83	5.142.803	20,99	1,37
1997/1998	3.567.097	20,08	6.014.540	16,95	1,18
1998/1999	3.387.967	5,02	6.555.905	9,0	0,56
1999/2000	4.910.778	44,95	8.011.806	22,0	2,02
2000	4.456.880	-9,24	7.074.418	-11,70	0,79
2001	8.467.347	89,98	14.073.123	98,16	0,92
2002	12.162.663	43,64	22.425.146	59,96	0,73
2003	18.489.366	52,01	32.882.358	46,63	1,11
2004	19.186.122	45,78	30.777.820	53,04	0,86
2005	23.800.474	56,8	37.830.788	55	1,18

Sumber: APBD Pemda Kabupaten Bantul (data diolah)

Tabel 3 menunjukkan bahwa pada tahun anggaran 1996/1997 sampai dengan tahun anggaran 2005, elastisitas retribusi terhadap PAD mengalami peningkatan yaitu 1,37% pada tahun 1996/1997 menjadi 1,18% pada tahun 2005, ini berarti elastisitas selama sepuluh tahun dapat dikatakan cukup tinggi.

Tahun anggaran 1996/1997 besarnya elastisitas 1,37% yang berarti setiap kenaikan retribusi sebesar 1% menyebabkan kenaikan retribusi sebesar 1,37% atau terjadi perubahan cukup besar atau retribusinya relatif peka terhadap PAD (elastis).

Tahun anggaran 1997/1998 elastisitasnya sebesar 1,18% artinya setiap kenaikan retribusi sebesar 1% menyebabkan kenaikan retribusi sebesar 1,18% atau tidak banyak terjadi perubahan pada PAD atau retribusinya relatif tidak peka terhadap PAD (inelastis).

Tahun anggaran 1998/1999 elastisitasnya sebesar 0,56% berarti setiap kenaikan retribusi sebesar 1% menyebabkan perubahan PAD sebesar 0,56% tidak banyak terjadi perubahan pada PAD atau retribusinya relatif tidak peka terhadap PAD (inelastis).

Tahun anggaran 1999/2000 elastisitas sebesar 2,02% berarti setiap kenaikan retribusi sebesar 1% menyebabkan kenaikan PAD 2,02% atau terjadi perubahan cukup besar pada PAD atau retribusinya relatif peka terhadap PAD (elastis).

Tahun anggaran 2000 elastisitasnya sebesar 0,79% berarti setiap kenaikan retribusi sebesar 1% menyebabkan kenaikan PAD sebesar 0,79% atau tidak banyak terjadi perubahan pada PAD atau retribusinya relatif tidak peka terhadap PAD (inelastis).

Tahun anggaran 2001 elastisitasnya sebesar 0,92% berarti setiap kenaikan retribusi 1% menyebabkan kenaikan PAD sebesar 0,92% atau tidak banyak terjadi perubahan pada PAD atau retribusinya relatif tidak peka terhadap PAD (inelastis).

Tahun anggaran 2002 elastisitasnya sebesar 0,73% yang berarti setiap kenaikan retribusi sebesar 1% menyebabkan kenaikan PAD sebesar 0,73% atau tidak banyak terjadi perubahan pada PAD atau retribusinya relatif tidak peka terhadap PAD (inelastis).

Tahun 2003 elastisitasnya sebesar 1,11% berarti setiap kenaikan retribusi 1 % menyebabkan kenaikan PAD sebesar 1,11% artinya banyak terjadi perubahan cukup besar pada PAD atau retribusinya relatif peka terhadap PAD (elastis).

Tahun 2004 elastisitasnya sebesar 0,86% yang berarti setiap kenaikan retribusi sebesar 1% menyebabkan kenaikan PAD sebesar 0,86% atau tidak banyak terjadi perubahan pada PAD atau retribusinya relatif tidak peka terhadap PAD (inelastis).

Tahun 2005 elastisitasnya sebesar 1,18% yang berarti setiap kenaikan retribusi sebesar 1% menyebabkan kenaikan PAD sebesar 1,18 % artinya terjadi perubahan yang cukup besar pada PAD atau retribusinya relatif peka terhadap PAD (elastis).

4. Analisis Trend Retribusi dan PAD

Perhitungan ini bertujuan untuk mengetahui prospek penerimaan retribusi pada tahun-tahun yang akan datang dimana retribusi merupakan salah satu sumber penerimaan dalam PAD.

Adapun rumusnya adalah sebagai berikut:

$$Y' = a + bx$$

$$a = \frac{\sum y}{n} \qquad b = \frac{\sum xy}{n}$$

y = nilai trend

Keterangan:

a = konstanta

b = slope

x = interval waktu

n = jumlah data

Tabel 4
Analisis Trend Retribusi Daerah Kabupaten Bantul
Tahun Anggaran 1996/1997 – 2005 (Rp 000)

No	Tahun	Y (Realisasi Penerimaan Retribusi)	X	XY	X ²	Y ²
1.	1996/1997	2.970.663	-9	-26.735.967	81	-708.462,25
2.	1997/1998	3.567.907	-7	-24.969.679	49	1.702.292,85
3.	1998/1999	3.387.967	-5	-16.939.835	25	4.113.046,95
4.	1999/2000	4.910.778	-3	-14.732.334	9	6.523.803,05
5.	2000	4.456.880	-1	-4.456.880	1	8.934.558,15
6.	2001	8.467.347	1	8.467.347	1	11.345.313,25
7.	2002	12.162.663	3	36.187.989	9	13.756.068,35
8.	2003	18.489.366	5	92.446.830	25	16.166.823,45
9.	2004	19.186.122	7	134.302.854	49	18.577.578,55
10.	2005	23.800.474	9	214.214.226	81	20.988.333,65
Jumlah		101.399.357	0	397.774591	330	

Sumber: APBD Pemda Kabupaten Bantul (data diolah)

Tabel 5
Analisis Trend PAD Kabupaten Bantul
Tahun Anggaran 1996/1997 – 2005 (Rp 000)

No.	Tahun	Y (Penerimaan PAD)	X	X.Y	X ²	Y ²
1.	1996/1997	5.142.803	-9	-46.285.227	81	-82.859.477,85
2.	1997/1998	6.014.540	-7	-42.101.780	49	-60.650.955,95
3.	1998/1999	6.555.905	-5	-32.779.225	25	-384.42.434,05
4.	1999/2000	8.011.806	-3	-24.035.418	9	-16.233.912,15
5.	2000	7.074.418	-1	-7.074.418	1	5.974.609,75
6.	2001	14.073.123	1	14.073.123	1	28.183.130,75
7.	2002	22.425.146	3	67.275.438	9	50.391.653,55
8.	2003	32.882.358	5	179.411.790	25	72.600.175,45
9.	2004	30.777.820	7	215.444.740	49	94.808.697,35
10.	2005	37.830.788	9	340.477.092	81	117.017.219,30
Jumlah		170.788.707	0	3.644406.115	330	

Sumber: APBD Pemda Kabupaten Bantul (data diolah)

Dari perhitungan analisis trend retribusi dan analisis trend PAD yang dilakukan untuk memproyeksikan penerimaan retribusi daerah dan PAD pada tahun 2007 – 2009 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan di setiap tahunnya yaitu trend retribusi daerah pada tahun anggaran 2007 diproyeksikan sebesar Rp 25.809.843,85, tahun 2008 sebesar Rp 28.220.598,95, dan tahun 2009 meningkat menjadi Rp 30.631.354,05. Hal ini juga dipengaruhi trend PAD yang pada tahun anggaran 2007 diproyeksikan meningkat menjadi Rp 161.434.263,10, tahun 2008 meningkat menjadi Rp 183.642.785,00, dan tahun 2009 meningkat menjadi Rp 205.642.785,00.

Secara nyata peningkatan terbukti dikarenakan potensi realisasi penerimaan retribusinya dari tahun ke tahun selalu meningkat, selain masih banyak lagi potensi realisasi penerimaan retribusi daerah dan PAD yang masih belum dapat dikembangkan seperti retribusi parkir, retribusi terminal, retribusi rumah potong hewan, retribusi tempat rekreasi dan olah raga, dan lain-lain untuk meningkatkan penerimaan PAD sehingga dapat membantu pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bantul yang selama ini telah dikembangkan tetapi masih belum berjalan optimal.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data tersebut di atas, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kontribusi daerah Kabupaten Bantul terhadap PAD pada periode tahun anggaran 1996/1997 sampai dengan tahun anggaran 2005 nilainya cukup baik dan hampir mendekati 100%. Oleh karena itu, hipotesis pertama, yang berbunyi: “Diduga kontribusi retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah dari tahun 1996/1997 – 2005 mengalami peningkatan”, adalah terbukti.
2. Efektivitas pengelolaan retribusi daerah terhadap PAD di Kabupaten Bantul selama sepuluh tahun dari periode 1996/1997 sampai dengan periode 2005 menunjukkan angka yang sangat baik dan cenderung efektif.
3. Elastisitas retribusi atau tingkat kepekaan perubahan retribusi yang menyebabkan perubahan penerimaan PAD di Kabupaten Bantul secara keseluruhan disimpulkan cenderung elastis.

4. Analisis trend retribusi terhadap PAD, untuk tiga tahun ke depan, yaitu tahun anggaran 2007, 2008, dan 2009 cenderung mengalami peningkatan. Terbukti dari hasil perhitungan dan analisis trend retribusi dan PAD pada tiga tahun ke depan diprediksikan meningkat. Pada tahun 2007 diproyeksikan sebesar Rp 25.809.843,85, tahun 2008 sebesar Rp 28.220.598,95 dan tahun 2009 meningkat menjadi Rp 30.631.354,05. Hal ini juga mempengaruhi trend PAD yang pada tahun anggaran 2007 diproyeksikan meningkat menjadi Rp 161.434.263,10, tahun 2008 meningkat menjadi Rp 183.642.785,00, dan tahun 2009 meningkat menjadi Rp 205.642.785,00.

DAFTAR PUSTAKA

- Anita, 2002. *“Kontribusi Retribusi Daerah dalam Menunjang PAD, Studi Kasus: Dinas Pendapatan Kota Bandar Lampung”*. Skripsi Fisip UNY, Yogyakarta.
- Halim, Abdul, 2001. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. UI Press, Jakarta.
- Haris, Benyamin, 1995. *“Peran Administrator Pemerintah Daerah terhadap Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah, Studi Kasus: Pemda Tk.II se-Jawa Barat”*. Prisma No. 4.
- Haryadi, Dedy, 2003. *“Kontribusi Retribusi Pasar terhadap Peningkatan PAD dalam Melaksanakan Otonomi Daerah Kota Bengkulu”*. Skripsi Fisip UMY, Yogyakarta.
- Kristiadi, JB., 1985. *Masalah Sekitar Pendapatan Daerah*. Andi Offset, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2003. *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi Offset, Yogyakarta.
- Mariun, 1975. *Asas-asas Ilmu Pemerintahan*. FISIP UGM, Yogyakarta.
- Pemda Kabupaten Bantul, 1995 – 2005. *Laporan APBD Kabupaten Bantul*.
- Undang-undang Otonomi 1999*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Riwu Kaho, Yosef, 2001. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. PT. Grafindo Persada, Jakarta.
- Santoso, Bagus, 1995. *“Retribusi Pasar Sebagai Pendapatan Asli Daerah, Studi Kasus: Pasar Kabupaten Sleman”*. Prisma No. 4.
- Suparmoko, 1994. *Keuangan Negara*. BPFE UGM, Yogyakarta.
- Subagyo, Pangestu, 1995. *Statistik Deskriptif*. Edisi III, BPFE, Yogyakarta.
- Yani, Ahmad, 2002, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. PT. Raja Grafindo, Jakarta.